



Buletin Parlementaria

Nomor 1094/II/III/2020 • Maret 2020



Pimpinan DPR Temui Komunitas *Driver* Ojol



9 772614 339005



4 Karang Taruna
diharapkan Mampu
Perkuat Nilai-nilai
Sosial Masyarakat



6 Rachmat Gobel Serap
Masukan Dubes Jepang
Jelang Pembahasan
'Omnibus Law'

Pimpinan DPR Temui Komunitas *Driver* Ojol

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat

Gobel menemui langsung komunitas *driver* ojek *online* (ojol) yang menyuarakan aspirasinya di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Gabungan *driver* ojol tersebut menyuarakan aspirasi dan meminta penjelasan dari wakil rakyat terkait wacana pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

“Yang sebenarnya tuntutan dari ojek *online* itu kan adalah hal yang wajar dan mendasar sehingga kita bisa mengerti, kalau mereka sekarang ini hidupnya dari diskresinya peraturan menteri, lalu kemudian sekarang dirancang sebuah undang-undang yang menurut mereka akan mematikan kehidupan mereka dan keluarga. Sehingga mereka datang kesini untuk menyampaikan aspirasinya,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu kepada para ojol.

Dasco menjelaskan DPR RI saat ini sedang menjalani masa reses, sehingga pembahasan lebih lanjut dengan komisi terkait masih belum bisa dilakukan. Namun, Dasco menegaskan aspirasi yang diterima DPR RI hari ini akan tetap disampaikan kepada Komisi V DPR RI yang saat ini sedang menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RUU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Sekarang DPR sedang Masa Reses, apapun aspirasi itu sudah disampaikan, kita terima dan akan kita sampaikan kepada kawan-

kawan yang sedang membuat undang-undang tersebut,” tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Selanjutnya, Dasco meminta komunitas *driver* ojol untuk membentuk tim kecil sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi melalui pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan secara berkala dengan komisi terkait.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan rasa terima kasihnya kepada *driver* ojol atas aspirasi yang disampaikan ke DPR RI. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menyebut *driver* ojol sebagai pahlawan transportasi, karena perannya yang besar turut membantu perekonomian Indonesia.

Menanggapi aspirasi komunitas *driver* ojol, Gobel menegaskan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan

masalah yang telah membuat para *driver* ojol menjadi resah. Senada dengan Dasco, politisi Fraksi Partai NasDem ini menyarankan agar para pengemudi ojol segera membentuk tim kecil yang membantu DPR RI dalam merumuskan RUU LLAJ.

“Seperti Pak Dasco juga sampaikan, kami akan membahasnya di rapat-rapat DPR, dan untuk lebih memudahkannya *bikin*-lah tim-tim kecil supaya pembahasan ini bisa lebih produktif dan lebih obyektif dalam diskusinya. Ada kewajiban kita, ada kewajiban bapak-ibu. Ini perlu kita bahas bersama-sama!” seru Gobel.

Usai mendengar penjelasan dari Pimpinan DPR RI, komunitas *driver* Ojol sepakat atas rekomendasi yang telah diberikan. Tak lama berselang, massa yang berkumpul di depan Gedung DPR RI perlahan mulai membubarkan diri dengan tertib. ■ nap/es/sf



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menemui Komunitas Driver Ojek Online (Ojol) yang menyuarakan aspirasinya di depan Kompleks Parlemen. Foto: Gerald/Mr

GKSB Diharapkan Mampu Pererat Hubungan Diplomatik



Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Oji/Mr

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi peningkatan jumlah negara yang tergabung dalam Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) dari yang sebelumnya berjumlah 54 negara kini bertambah menjadi 102 Parlemen negara sahabat. Bertambahnya jumlah negara itu diharapkan mampu memperkuat jalinan kekeluargaan dan kerja sama dengan negara lain.

“Kami tentu saja berharap penambahan banyak negara ini bukan hanya untuk acara seremonial saja tapi bagaimana jalinan persahabatan dan kekeluargaan diantara negara ini akan mengingatkan kembali sejarah-sejarah seperti yang pernah disampaikan *founding father* Bung Karno,” ujar Ketua DPR Puan Maharani saat meresmikan GKSB 102 Parlemen negara sahabat di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Adapun ada empat harapan yang disampaikan oleh Puan terkait GKSB ini yakni memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat, meningkatkan kesepahaman terkait isu-isu global, menghasilkan terobosan atau inovasi yang memecahkan tantangan baru di dunia dan meningkatkan kepercayaan dan *mutual understanding*

dari negara Indonesia dengan parlemen negara sahabat.

Puan juga menjabarkan bahwa di tahun 2020 ini, DPR RI akan menjadi tuan rumah di 2 kegiatan internasional yakni Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) dan Sidang Ketua Parlemen Negara Eurasia. Melalui dua kegiatan itu diharapkan menjadi momentum meningkatkan jalinan persahabatan Indonesia dengan negara-negara sahabat.

“Tentu saja ini salah satu implementasi bahwa politik bebas aktif yang dilakukan parlemen Indonesia atau DPR ini diharapkan menguatkan jalinan persahabatan dan kekeluargaan di negara-negara lain,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini.

Turut serta dalam peresmian GKSB ini, Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BKSAP DPR RI. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di dunia internasional membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. DPR RI pun diharapkan mampu berperan serta aktif dalam menjalankan tugas diplomasi untuk meningkatkan semangat kekeluargaan dengan bangsa-bangsa lainnya. ■ hs/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindyia, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Armanda P.S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Karang Taruna Diharapkan Mampu Perkuat Nilai-nilai Sosial Masyarakat



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyampaikan pidato pada Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Foto: Tiara/Mr

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan penting bagi Karang Taruna Sawahlunto Masa Bakti 2019-2024 untuk bisa memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam membentuk dan memperkuat nilai-nilai sosial di masyarakat. Dalam hal ini, Karang Taruna diharapkan mampu berdaya guna dan memiliki efektivitas serta bermanfaat di dalam pengaplikasian program kerjanya di lingkungan masyarakat.

“Saya harapkan kepada Karang Taruna yang dilantik bisa bersinergi dengan program-program kerja pemerintah. Bersama mengentaskan masalah-masalah yang ada di Kota Sawahlunto dan harus saling mendukung jangan sampai mengganggu pertumbuhan dan stabilitas

Kota Sawahlunto,” ucap Azis saat menjadi *keynote speaker* acara Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Jumat (28/2).

Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu mencontohkan, Karang Taruna bisa mengecek apakah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah disalurkan secara tepat sasaran. Seperti yang diketahui PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (PKH) PKH.

“Silahkan Karang Taruna mengecek apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak. Jangan sampai yang dapat PKH itu semuanya tergolong keluarga yang mampu, nah ini harus dicek.

Kalau ekonomi rakyat di desa maju dan bersinergi nantinya kerja daripada Babinkabtimas dan institusi Polri akan terbantu. Tentu hal ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut Azis mengimbau dalam penyusunan program kerjanya, pemuda karang taruna harus terus mendukung dan berlandaskan ideologi Pancasila dan UUD 1945. “Seperti yang tertuang dalam mars karang taruna, substansi dari isinya adalah bagaimana membela Pancasila dan UUD 1945 agar ekonomi kerakyatan dan UMKM itu bisa tumbuh,” ungkapnya.

Terkait peningkatan kualitas SDM di dalam Karang Taruna, Azis mengingatkan langkah baiknya bila tidak semua pemuda berlomba-lomba menjadi ASN, Pegawai Kejaksaan, TNI maupun Polisi. Namun, pemuda juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan menjadi pengusaha atau *entreprenur* guna meningkatkan stabilitas ekonomi.

“Untuk itu sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna diharapkan menjadi wadah untuk membina, mengembangkan, serta memberdayakan potensi pemuda di suatu wilayah desa guna memberikan dampak positif bagi lingkungan wilayah desa tersebut,” ungkap legislator dapil Lampung II itu.

Karang Taruna seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018, merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat. ■ tra/es

Libatkan Generasi Cerdas Mencerahkan Pendidikan Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan masa depan pendidikan Indonesia akan semakin cerah jika melibatkan generasi bangsa yang cerdas. Pernyataan tersebut disampaikannya usai meninjau *startup* Penyedia Layanan dan Konten Pendidikan, Ruangguru. Menurut Muhaimin, cara kerja yang manual akan sulit menjangkau luas wilayah Indonesia dengan penduduk dan peserta didik yang banyak.

“Ternyata masa depan pendidikan kita sangat cerah kalau melibatkan semua orang-orang cerdas, kreatif, inovatif. Jangkauan penduduk kita yang begitu luas tidak mungkin bisa diatasi dengan cara kerja pemerintah yang manual, cara kerja pemerintah yang terbatas,” papar Muhaimin di Jakarta, Jumat (28/2).

Saat berkunjung ke Ruangguru, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra

ini berdialog dengan Co-Fonder Ruangguru Muhammad Iman Usman. Kemudian berkesempatan meninjau beberapa ruang kerja para kreatornya serta melihat proses pembuatan konten pembelajaran lewat media *startup*. Dia mengatakan cara kerja Ruangguru sangat efektif dalam memberikan pembelajaran, oleh sebab itu *startup* ini layak menjadi *partner* Pemerintah dalam mendidik generasi muda Indonesia.

“Karena itu melibatkan seperti Iman Usman, Ruangguru menjadi bagian dari *partner* efektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan literasi, berdaya saing, kompetensi semua bisa,” jelas politisi Fraksi PKB itu.

Dia pun mengimbau agar Pemerintah mampu menyesuaikan laju perkembangan zaman. “Kita mengimbau kepada kementerian untuk belajar lebih banyak lagi tentang perkembangan yang cepat di dunia IT, perkembangan

yang cepat di dunia pendidikan, baik dari segi konten pendidikan, isi materi pembelajaran, sampai pada strategi dan cara pembelajaran yang sudah berubah,” ungkap Muhaimin.

Menurutnya dunia ini berubah semakin maju, dan perubahan harus diantisipasi dengan kecepatan pemerintah untuk merespon dengan melibatkan semua pihak. “Kita berharap pemerintah memberi ruang dan kerja sama yang luas kepada tumbuhnya orang-orang seperti Iman Usman, kaya Ruangguru ini, sehingga bisa berkiprah lebih besar lagi buat Indonesia,” ujar legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Dia pun menambahkan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mampu mengejar ketertinggalan dunia pendidikan Indonesia. “Saya berharap Menteri Pendidikan yang baru yang ber-*partner* dengan Komisi X DPR RI bisa mengejar ketertinggalan,” imbuhan Muhaimin. ■ eko/es



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meninjau startup Penyedia Layanan dan Konten Pendidikan, Ruangguru. Foto: Naeuroji/Mr

Rachmat Gobel Serap Masukan Dubes Jepang Jelang Pembahasan ‘Omnibus Law’

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI berupaya mendapatkan berbagai masukan dari Jepang sebagai salah satu negara investor terbesar di Indonesia, terkait dengan RUU *Omnibus Law* yang saat ini digodok pembahasannya di DPR RI bersama Pemerintah.

“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari Jepang. Sebab Jepang sendiri merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, baik di sektor manufaktur dan lain sebagainya. Secara total *direct* maupun *indirect*. investasi Jepang di Indonesia nomor satu,” ucap Gobel, Jumat (28/2).

Ia menegaskan, masukan terpenting dari pertemuan dengan Dubes Jepang tersebut adalah terkait sektor investasi. Dikatakannya, Jepang bukan hanya sekedar investasi uangnya, tetapi negara Jepang ikut melakukan pembangunan

sumber daya manusia yang ada.

“Dia (Jepang) membina sumber daya manusianya. Kalau kita lihat, Jepang sendiri kekurangan angkatan kerja, hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mengisi kekosongan mereka dengan memberikan apa yang kita miliki,” ujar politisi Partai Nas-Dem itu.

Ia membantah argumen yang mengatakan bahwa selama ini tidak ada transfer teknologi yang dilakukan oleh (perusahaan-perusahaan) Jepang. “Padahal sesungguhnya sudah ada transfer teknologi tersebut, yakni melalui pembangunan SDM. Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian daripada transfer teknologi itu sendiri,” tandas Gobel.

Gobel menyampaikan, saat ini, selain dengan negara Vietnam, Indonesia juga sedang bersaing dengan negara India dalam menggaet investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Oleh karena itu penting sekali mendapatkan masukan-masukan dari Dubes Jepang.

“Ke depan kita ingin tahu pemikiran, pandangan dan masukan Jepang selaku investor terbesar di Indonesia. Sekarang ini, di samping Vietnam, kita juga sedang bertarung dengan India. Karena India juga sedang membuka investasi. Sehingga (dimungkinkan) investasi itu akan terpecah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga akan melihat India. Sebab kemungkinan besar, investasi juga akan masuk ke negara India,” pungkasnya. ■ dep/es



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima kunjungan Dubes Jepang untuk Indonesia. Foto: Jaka/Mr



Perkuat Diplomasi Parlemen, BKSAP Resmikan 102 GKSB

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meresmikan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen negara sahabat. Peresmian tersebut diungkapkan Fadli sebagai langkah memperkuat diplomasi Parlemen, yang sebelumnya berjumlah 53 negara dan kini bertambah menjadi 102 negara.

“Penambahan grup kerja sama bilateral ini untuk mendukung diplomasi yang dijalankan Kementerian Luar Negeri.

Harapannya, kita bisa melaksanakan total diplomasi dan menjangkau semua negara dari seluruh benua,” ujar Fadli usai peresmian 102 GKSB yang dihadiri Pimpinan DPRI dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dan duta besar negara sahabat, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan diplomasi parlemen, BKSAP menjangkau 102 parlemen negara sahabat dari seluruh benua. Termasuk menjangkau parlemen negara-negara pasifik. “Jadi, tidak ada referensi negara-negara tertentu yang itu-itu saja,” imbuh Fadli seraya menambahkan, Parlemen merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan politik luar negeri (polugri).

Sebab, lanjut legislator dapil Jawa Barat V itu, terkadang dalam menjalankan polugri, ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau eksekutif. Berbeda dengan Parlemen yang bisa lebih luwes menjalankan



DENGAN DEMIKIAN SEMUA NEGARA MEMPUNYAI HUBUNGAN BAIK DENGAN INDONESIA, SEMUANYA AKAN TERJANGKAU DENGAN PARLEMEN

diplomasi, karena mewakili representasi rakyat. “Dengan demikian semua negara mempunyai hubungan baik dengan Indonesia, semuanya akan terjangkau dengan parlemen, ada eksplorasi untuk memperkuat diplomasi pemerintah dan negara,” terang Anggota Komisi I DPR RI itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana turut mengapresiasi peningkatan grup kerja sama bilateral. Menurutnya, selama ini banyak permintaan dari parlemen negara – negara sahabat agar dibentuknya GKSB atau *friendship grup of parliamentary*.

“Mereka selalu mengatakan ingin terus melakukan peningkatan dialog kerja sama di segala bidang yang memang parlemen bersama pemerintah menjadi ujung tombak diplomasi. Dan melalui GKSB ini, kita siapkan delegasi untuk bisa melakukan dialog dan komunikasi,” ujar politisi Fraksi Demokrat ini.

- Sharing best practices
exchange visits
- Establishment of
Group (GKSB)



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon meresmikan 102 GKSB dengan Parlemen negara sahabat. Foto: Oji/Mr

Adapun isu-isu regional maupun global yang akan diusung BKSAP, menurut Putu diantaranya isu kelapa sawit Indonesia dan isu Papua. “Kedua isu ini menjadi penting karena isu itu diangkat oleh parlemen negara lain. Sehingga, isu ini harus kita solusikan, sehingga apa yang menjadi kekuatan produk bangsa dan negara bisa kita perjuangkan di tingkat global,” terang Putu.

Selain itu, GKSB juga dapat menjangkau negara-negara pasifik yang selama ini selalu menyoal isu Papua. Dengan demikian, adanya grup kerja sama ini, parlemen Indonesia bisa terus menjalin komunikasi dengan parlemen negara pasifik dan diproyeksikan dalam waktu dekat akan dibentuk Panja Pasifik.

“Kita bangun kerja sama yang baik sehingga mereka (negara pasifik) juga dapat mengetahui bahwa kita ingin bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan, baik di Asia maupun Kawasan Pasifik,” tandas legislator dapil Bali itu. ■ ann/sf

Komisi I Pastikan Kesiapan TNI Amankan Pilkada 2020 Kalsel

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memastikan persiapan dan kesiapan jajaran Lanud Syamsudin Noor, Lanal Banjarmasin dan Komando Distrik Militer (Korem) 101/Antasari dalam menghadapi dan mengamankan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan Komandan Lanud Syamsudin Noor, Komandan Lanal Banjarmasin dan Danrem 101/Antasari di Aula R. D Syuryadarma Lanud Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalsel, Jumat (28/2). Ia berharap, ketiga matra TNI ini dapat berpartisipasi dalam peningkatan pengamanan wilayah Kalsel untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang tidak diinginkan.

“Terkait dengan kesiapan TNI untuk mengamankan wilayah Kalsel dalam persiapan Pilkada 2020 ini saya kira ini perlu dilihat. Sudah sejauhmana persiapan dan kesiapannya,” jelas Kharis. Komisi I DPR RI ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra kerja secara langsung di lapangan. Diketahui bahwa terdapat potensi ancaman maupun kerawanan yang akan muncul pada Pilkada 2020 di Kalsel.

”

KETIGA MATRA TNI INI DAPAT BERPARTISIPASI DALAM PENINGKATAN PENGAMANAN WILAYAH KALSEL UNTUK MENGANTISIPASI TERJADINYA KONFLIK SOSIAL YANG TIDAK DIINGINKAN

Karenanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, diperlukannya pengamanan yang tepat dalam pengawasan Pilkada 2020 di Kalsel. “Ancaman dan kerawanan pasti ada. Tapi kalau kita (Komisi I DPR RI) lihat intensitasnya, itu tidak terlalu berat, sehingga masih mampu di antisipasi. Dalam rapat juga terungkap bahwa mudah-mudahan aman dan sudah relatif kondusif,” ungkap Kharis.

Oleh karena itu, Tim Kunker Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Lanud Syamsudin Noor, Korem 101/Antasari dan Lanal Banjarmasin dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Kalsel.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Komandan Lanud Shamaudin Noor Kolonel PhB M. Taufiq Arasj memastikan akan menyampaikan kepada Komisi I DPR RI jika ada permasalahan dalam mengamankan Pilkada Kalsel. “Kami berharap kepada Komisi I DPR RI bahwa jika ada sekecil apapun permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang dialami oleh kami, kami akan menyampaikan dan semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh Komisi I dalam pengembangan TNI dimasa mendatang,” jelas Taufiq. ■ hnm/sf



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Foto: Hanum/Mr

Aturan Ekspor Bibit Lobster Belum Berlaku



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI ke NTB. Foto: Kiki/Mr

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memastikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dibukanya keran ekspor bibit lobster, belum berlaku. Karena sampai saat ini Menteri KKP belum menandatangani peraturan itu, dan masih melakukan kajian dan koordinasi secara rutin bersama dengan Komisi IV DPR RI. Namun, Sudin tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut akan berlaku ke depannya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, apabila tidak mengganggu siklus dan kebutuhan lobster dalam negeri, pihaknya mendukung diberlakukannya regulasi tersebut. Selain itu, maraknya fenomena penyelundupan bibit lobster

ke luar negeri yang belakangan ini yang terjadi, menjadi salah satu faktor pertimbangan Komisi IV DPR RI terhadap regulasi itu.

“Kalau memang tidak mengganggu siklus dan kebutuhan dalam negeri, ya silahkan (regulasi ekspor bibit lobster diberlakukan),” kata Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau budi daya lobster di Kecamatan Jero Waru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (1/3).

Lanjut Sudin, Komisi IV DPR RI tidak akan tutup mata terhadap keresahan peternak lobster serta para pelaku usaha lobster. Pihaknya akan berupaya menambah anggaran untuk pengembangan budi daya lobster di

”

**MENDUKUNG BUDI
DAYA LOBSTER, BAIK
DALAM BENTUK
PENAMBAHAN
ANGGARAN MAUPUN
PENGADAAN SARANA
PRASARANA SERTA
TENAGA AHLI DARI
LUAR NEGERI UNTUK
MEMBERIKAN
ILMUNYA DI BIDANG
LOBSTER INI**

Indonesia. Selain itu, Komisi IV DPR RI berencana mendatangkan para ahli dari luar negeri, seperti dari Thailand atau Vietnam serta mendukung pengadaan sarana dan prasarana pengembangan budi daya lobster.

“Komisi IV DPR akan mendukung budi daya lobster, baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun pengadaan sarana prasarana serta tenaga ahli dari luar negeri untuk memberikan ilmunya di bidang lobster ini,” komitmen Sudin sembari meminta kepada para peternak dan pembudidaya lobster untuk tidak perlu khawatir dengan adanya rencana kebijakan yang baru dari KKP terkait diperbolehkannya ekspor bibit lobster.

Legislator dapil Lampung I itu memastikan, Komisi IV DPR RI selalu mengawal kinerja dan program-program KKP demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebelumnya, sejumlah peternak lobster di NTB mengeluhkan dengan adanya kebijakan baru dari KKP terkait ekspor bibit lobster yang dinilai merugikan peternak. ■ qq/sf

Pemerintah Harus **Setop Impor Bawang Putih**



Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin berkunjung ke di Desa Tlahab, Temanggung, Jawa Tengah. Foto: Topan/Mr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mendorong Pemerintah untuk menghentikan impor bawang putih. Mengingat terdapat sejumlah daerah di Indonesia mempunyai potensi pengembangan komoditas pertanian dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam negeri.

“Komitmen Komisi IV akan membuat keputusan politik setop impor bawang putih. Karena, lahan di Indonesia mencukupi untuk ditanami bawang putih,” katanya saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI di Desa Tlahab, Kecamatan Keldung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (28/2).

Hasan menuturkan, Komisi IV DPR RI juga mendorong Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Pertanian melakukan sinkronisasi anggaran guna mendukung pengembangan pertanian bawang putih di Temanggung yang mampu mendukung kebutuhan bawang putih untuk Indonesia mencapai 25 persen.

“Padahal hamparan lahan yang cocok ditanami bawang putih sangat banyak. Contohnya, di wilayah Bromo Jawa Timur ada empat daerah yang cocok ditanami bawang putih,” ungkap politisi dapil Jawa Timur II itu.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai NasDem ini menyinggung masalah kelangkaan pupuk yang terjadi pada

waktu tertentu, masalah-masalah tersebut seolah-olah sengaja dibuat oleh oknum tertentu. “Isu kelangkaan pupuk ini memang merupakan permainan para petani kaya, yang memiliki lahan di atas dua hektar,” imbuhs Hasan.

Hasan mengatakan, isu-isu tersebut sengaja dibuat agar tidak ada ketentuan pengetapan aturan siapa yang berhak memperoleh atau membeli pupuk bersubsidi. “Manakala hambatan itu dilakukan distributor ataupun agen pupuk, maka kami Komisi IV akan melakukan evaluasi kepada distributor atau agen pupuk agar tidak dipercaya secara tunggal untuk mengedarkan pupuk kepada petani,” imbuhs Hasan usai peninjauan potensi pertanian. ■ tn/es

BPKS Harus Punya *Grand Design* Pembangunan Sabang

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyayangkan Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang yang sampai saat ini belum memiliki *grand design* tentang arah rencana pembangunan Sabang ke depan. Padahal, BPKS ini sudah lama didirikan tetapi hingga sekarang belum ada konsep matang yang diajukan kepada Komisi VI untuk kemudian bisa dilakukan penyesuaian anggaran.

Hekal menjelaskan, bahwa anggaran BPKS Sabang itu dari tahun ke tahun selalu normatif. Sehingga, seharusnya ini menjadi evaluasi internal bagi BPKS untuk bisa segera membuat *grand design* pembangunan Sabang.

Jika, *grand design* pembangunan Sabang sudah disusun secara matang maka bisa dipastikan Komisi VI DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran.

“BPKS itu dari tahun ke tahun anggaran normatif dan relatif kecil. Kita menilai, bahwa belum ada konsep yang benar-benar matang sehingga dari tahun ke tahun itu hanya dapat untung sedikit-sedikit. Nah, itu yang kami sayangkan dan kami titip kepada pemerintah provinsi karena ini harus dipikirkan dengan matang, mau *dibikin* apa kawasan Sabang ini,” ujar Mohammad Hekal saat kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Jumat, (28/2).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyayangkan bahwa rencana rencana yang disusun di BPKS ini selalu berubah dalam waktu yang singkat. Misalnya tahun ini mau

membuat pelabuhan, lalu tiba-tiba berubah lagi rencananya dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada konsep yang jelas dan matang.

“Hampir *nggak* ada *planning* jangka panjang, dan walaupun ada relatif basa-basi, nanti berapa tahun kemudian ganti lagi. Hari ini mau *bikin* ini, besok mau *bikin* itu dan akhirnya tak ada *grand design* konsep yang jelas dan matang. Ini kan mitra kerja Komisi VI DPR RI dan setiap kali kita tanya terus tidak pernah ada konsep yang matang,” terangnya.

Hekal menduga bahwa persoalan sumber daya manusia di BPKS Sabang ini perlu mendapat dukungan tambahan. Ia mengusulkan, agar bisa memanggil konsultan profesional untuk membantu menyusun konsep *grand design* pembangunan Sabang. Bahkan jika perlu dilakukan kerja bersama antara konsultan profesional dengan konsultan lokal agar pembangunan Sabang ini tetap menjaga kearifan lokalnya.

“Kami usulkan, kalau perlu memanggil konsultan yang profesional dan dikawinkan dengan konsultan lokal, jadi ada kearifan lokalnya. Saya takut SDM di sini belum mempunyai cukup wawasan untuk menentukan itu. Karena, kan daerah Sabang itu sangat dekat dengan laut internasional dan berdekatan dengan Malaysia, Thailand, Singapura. Jadi harus pertimbangannya tingkat internasional mau dijadikan apa,” tegasnya.

Semua proses penyusunan *grand design* Sabang itu sepenuhnya menjadi kewenangan BPKS, namun Komisi VI DPR RI memastikan jika *grand design* itu sudah disusun secara matang maka Komisi VI DPR RI siap mendukung dari sisi anggaran agar Sabang bisa menjadi kawasan yang maju dan modern. ■ hs/es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal bertukar cenderamata dengan direksi BPKS. Foto: Hendra/Mr

Distribusi Elpiji Harus Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, persoalan pendistribusian elpiji 3 kilogram harus diawasi dengan ketat agar distribusi tersebut tepat sasaran. Mengingat, banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan elpiji 3 kg yang disinyalir ada pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Ada persoalan mengenai gas 3 kg yang selama ini dikeluhkan kurang. Ternyata karena ada pelanggaran di lapangan. Pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena banyak masyarakat bukan penerima subsidi

tetapi dia menerima dan menggunakan gas 3 kg bersubsidi,” ujar Martin Manurung saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sumatera Utara dan mitra kerja terkait di Aula Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (28/2).

Politisi dapil Sumatera Utara II ini menegaskan perlu dilakukan penegakkan hukum atas tindakan yang merugikan masyarakat tersebut. Komisi VI DPR RI dengan tegas akan merekomendasikan pencabutan izin agen apabila terbukti ada penyelewengan yang dilakukan.

Dalam Kunker tersebut, Komisi VI DPR RI menyerap aspirasi dari Gubernur

”

BAHWA SELURUH ASPIRASI YANG DIUNGKAPKAN TERKAIT KENDALA GAS, LISTRIK DAN PUPUK AKAN DIKAWAL OLEH KOMISI VI DPR RI

Sumut Edy Rahmayadi, Bupati dan Wali Kota di Sumut. Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang diungkapkan terkait kendala gas, listrik dan pupuk akan dikawal oleh Komisi VI DPR RI.

“Keluhan tersebut sudah dijawab langsung oleh mitra kerja Komisi VI DPR RI. Keluhan dari Gubernur Sumut akan dimonitor oleh Komisi VI, serta akan memanggil pihak terkait. Apabila tidak ada realisasi dan tidak ada perhatian maka kita akan panggil ke Senayan,” tegas politisi F-NasDem itu. ■ eno/es



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan perwakilan Direksi BUMN di Kantor Gubernur Sumut, Medan. Foto: Kresno/Mr

Komisi VI Pantau Kinerja BUMN di Jatim



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria memimpin Kunker Komisi VI DPR RI ke Jawa Timur. Foto: Skr/Mr

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan pengawasan terhadap beberapa perusahaan pelat merah di bawah koordinasi Kementerian BUMN yang menjalankan tugas anggaran APBN melalui subsidi dan Public Service Obligation (PSO). Sebagaimana diketahui, realisasi sementara PSO sebesar Rp 4,1 triliun dari 61,1 persen APBN tahun 2019.

“Kita sudah bertemu dengan beberapa BUMN, mendengarkan berbagai permasalahan dan keluh kesahnya. BUMN Pupuk yang memang menyediakan pupuk subsidi untuk kebutuhan petani, khususnya petani

Jawa Timur menyampaikan keluh kesahnya, terutama mengenai alokasi kuota pupuk yang jumlahnya turun hampir 52 persen karena faktor *upload* data digital yang baru,” ungkap Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan beberapa direksi BUMN yang ada di Jatim, di Surabaya, Jumat (28/2/2020).

Sementara itu, terkait dengan kinerja PT. Pertamina, Aria Bima menyampaikan bahwa kebutuhan solar untuk para nelayan, khususnya di pesisir kota/kabupaten Jatim yang masih kekurangan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Langsung kita eksekusi juga dan Pertamina siap untuk membangun SPBU-SPBU, dua diantaranya akan dibangun di daerah Tuban yang tanahnya akan disiapkan

oleh Pemda setempat,” ungkapnya.

Terkait PT. PLN, Aria Bima mendapat informasi bahwa kebutuhan listrik industri maupun rumah tangga di Jatim terjadi *over supply* sebesar 2000 Mega Watt dan tambahan 400 MW lagi ada nanti akan dibangun baru. “Dengan demikian, sudah tidak ada masalah lagi tentang kebutuhan listrik di Jawa Timur. Sekarang, justru bagaimana membuka ruang baru untuk pasar-pasar listrik yang tidak bisa lepas dari kebutuhan listrik industri yang pengembangan industri di Jawa Timur akan cepat,” ujar Aria Bima.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, dulu Jatim mengalami defisit listrik, namun sekarang menjadi deposit. Menurutnya, deposit ini sesuatu yang menggembirakan, kendati masih 8 persen di daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik karena faktor transmisi dan kepulauan. PLN telah mengkreasikan dengan kebutuhan tenaga surya. Lebih lanjut, Aria Bima menambahkan, selain membicarakan kebutuhan pupuk, listrik, BBM, distribusi elpiji 3 kg di Jatim selama ini dinilai tidak mengalami kendala.

“Bagaimana rencana dari distribusi terbuka menjadi tertutup, saya lihat di Jawa Timur tidak terlalu masalah. Hanya di hari-hari besar keagamaan saja kadang mengalami satu lonjakan,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah V itu. Sementara terkait Bank BUMN, Garuda Indonesia, Telkom, PT. PAL, dan BUMN lainnya di Jatim, Aria Bima menilai kinerjanya sudah berjalan baik dan mengalami peningkatan. Aria Bima meminta agar BUMN-BUMN untuk saling berkolaborasi dan bersinergi, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan terutamanya yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. ■ skr/es

Komisi VIII Apresiasi Kerukunan Umat Beragama Sulut

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung dengan sangat kondusif. Ia mendorong Pemprov Sulut dan semua pihak untuk terus menjaga harmonisasi antar umat beragama yang sejak lama telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Sulut.

Demikian diungkapkan Ace Hasan usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, Kakanwil Kemenag Sulut, BPBD Sulut, Perwakilan Kemensos serta *stakeholder* di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Jumat (28/2). Ace menilai tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan, dari kerukunan antar umat beragama di Sulut.

“Sebagaimana penjelasan dari Kakanwil Kemenag Sulut dan juga dari Ketua FKUB Sulut, suasananya sudah sangat kondusif. Sejauh yang kami amati, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari kerukunan umat beragama. Saya kira, semua

pihak harus terus menjaga harmonisasi tersebut dengan tetap menjaga kondusifitas. Dengan, menjaga masyarakatnya betul-betul saling melindungi, saling tenggang rasa terhadap keyakinan agamanya masing-masing,” ujar Ace Hasan.

Untuk itu, dalam rangka terus menjaga suasana harmonisasi kerukunan antar umat beragama, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama masuk dalam Prolegnas 2019-2024 sebagaimana usulan Komisi VIII DPR RI. Sebab, sambung Ace Hasan, selama ini dasar hukum dari FKUB baru sebatas

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Memang, selama ini dasar hukum dari FKUB yang ada di Indonesia ini baru sebatas peraturan berupa PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Alangkah lebih baiknya jika itu kemudian diangkat menjadi UU. Itu yang kami juga usulkan, termasuk diantaranya kewajiban untuk setiap kabupaten, kota dan provinsi mendukung terhadap keberadaan FKUB tersebut,” papar Ace.

Pada kesempatan yang sama, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini menegaskan, RUU Kerukunan Umat Beragama tersebut penting kehadirannya mengingat FKUB memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Apalagi, tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya memang tokoh-tokoh yang berpengaruh dari masing-masing agama. Sehingga, sejak dari awal kita bisa mendeteksi potensi-potensi yang bisa menimbulkan terganggunya kerukunan umat beragama. Maka, Komisi VIII memasukkan RUU

Kerukunan Umat Beragama ke dalam daftar Prolegnas 2019-2024,” pungkas Ace.

■ pun/es

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Ace Hasan Syadzily. Foto: Puntho/Mr





Tim Kunker Komisi IX DPR RI meresmikan kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat bersama Gubernur Sulbar dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Foto: Erlangga/Mr

Komisi IX Resmikan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mendapat kesempatan untuk ikut meresmikan kantor daerah baru BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat bersama Gubernur Sulbar Muhammad Ali Baal Masdar dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Mamuju, Sulbar, Jumat (28/2).

Felly mengatakan bahwa dengan adanya kantor baru ini tentu Komisi IX DPR RI berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan kenyamanan dan memudahkan masyarakat Sulbar dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam bekerja. Serta, ia berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau masyarakat Sulbar lebih dalam untuk meningkatkan tingkat kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan di Sulbar.

“SJSN merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya jaminan perlindungan sosial, tentunya para pekerja juga akan lebih merasa aman dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko yang mungkin terjadi saat bekerja seperti sakit, PHK, kecelakaan kerja, pensiun, hingga kematian bisa menjadi lebih ringan bila kita terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Felly kepada **Parlementaria**.

Politisi Partai NasDem ini turut mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Sulbar dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, yaitu memberikan kesejahteraan

sosial kepada rakyat. “Kita tahu bangunan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah milik Pemprov Sulawesi Barat yang dihibahkan. Artinya, ada komitmen kuat dari Pemprov beserta *stakeholder* ketenagakerjaan untuk menjangkau masyarakat. Ini patut kita acungi jempol,” jelas Felly.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Felly turut menyampaikan secara simbolis bantuan kepada korban hasil dari kecelakaan dan kematian dalam bekerja. Menurutnya, hal ini baik untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Sulbar agar dapat mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Ini penting sekali untuk daerah ini. Dan sangat-sangat membantu untuk pelayanan dari dinas ketenagakerjaan yang ada di Sulbar ini,” tukas legislator dapil Sulawesi Utara itu. ■ **er/sf**

Layanan Kesehatan Papua Perlu Pola Baru

Kemiskinan yang menimpa masyarakat Papua mengancam terjadinya kasus gizi buruk.

Ditambah lagi, akses infrastruktur yang minim membuat masyarakat Pulau Cenderawasih kian sulit mendapat akses kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai perlu rumusan pola baru untuk memberi layanan kesehatan di provinsi paling timur Indonesia itu.

“Persoalan di Papua ini kompleks sekali. Secara teknis berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Basis layanan kesehatan ini, kan, melalui KTP-el dan orang-orang pedalaman

sulit mendapatkan KTP-el. Ini tentu menyulitkan akses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah,” papar Melki, sapaan akrabnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Jayapura, Papua, Jumat (29/2).

Politisi Partai Golkar itu menyerukan agar ada pola sendiri dalam mengakses layanan kesehatan maupun KTP-el, Sehingga, bisa

”

KE DEPAN MASALAH KESEHATAN HARUS MENDAPAT PENANGANAN KHUSUS. SAYA KIRA KAPASITAS EKONOMI MASYARAKAT PAPUA HARUS KITA TINGKATKAN

menjangkau sebanyak mungkin orang Papua. Infrastruktur yang tidak memadai selama ini jadi kendala utama semua persoalan di Papua. “Ke depan, masalah kesehatan harus mendapat penanganan khusus. Saya kira kapasitas ekonomi masyarakat Papua harus kita tingkatkan,” ucap Melki kepada *Parlementaria*.

Butuh sinergi dengan sektor lain untuk memberdayakan masyarakat Papua. Misalnya, memberdayakan sektor pendidikan, pertanian, dan peternakan sesuai kemampuan yang ada. Bila sudah diberdayakan, tentu nanti masyarakatnya mampu membeli makanan-makanan yang bergizi, sehingga tingkat kesehatannya meningkat.

“Kemenkes punya kontribusi 30 persen atas masalah gizi buruk. 70 persen sisanya ada di sektor lain, misalnya PUPR yang harus membangun sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lain. Ini tugas Pemda dan pemerintah pusat,” sebut legislator asal NTT ini. ■ mh/sf

Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Foto: Husen/Mr



Komisi IX Dukung Pengembangan BLK Kota Padang

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar berharap Balai Pelatihan

Kerja (BLK) Kota Padang dapat menjadi *pilot project* bagi masyarakat yang membutuhkan keahlian kerja pada bidang kerja yang diinginkan. Ke depannya, Komisi IX DPR RI akan mendukung agar BLK Kota Padang bisa dikembangkan lebih baik lagi.

“Saya dan tim berkunjung ke BLK Kota Padang melihat beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di sini, ada pelatihan pengoperasian mesin bubut, pelatihan *garmen apparel* serta pelatihan lainnya,” katanya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau BLK Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/2).

Ansory mengusulkan agar program-program pelatihan keahlian yang ada di BLK Kota Padang lebih ditingkatkan lagi, menyesuaikan dengan bidang kebutuhan dan kepentingan masyarakat. “Kalau berbicara masalah anggaran, kami akan tambah,” imbuh politisi Fraksi PKS itu.

Pendapat yang sama disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla. Ia mengapresiasi kinerja BLK Kota Padang dan menilai apa yang sudah dilakukan sangat luar biasa. “Melihat begitu tingginya komitmen mereka untuk mendorong program kerja. Saya sempat bertemu dan berbicara dengan salah satu mitra mereka yang menerima hasil *output* dari tenaga kerja BLK. Ini hal yang luar biasa,” puji Ratu Ngadu.

Berdasarkan pemaparan, lanjut Ratu Ngadu, BLK Kota Padang

sudah menjalin kerja sama dengan beberapa *stakeholder* diantaranya BPN, BNN, Pemerintah Desa, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Dinas Sosial Kota Padang, industri usaha dan lainnya. Terobosan seperti ini menurutnya penting dilakukan dalam rangka menekan angka pengangguran dengan *upgrading skill* dari pengembangan kerja sama antara BLK Kota Padang dengan *stakeholder*.

“Dengan kerja sama dengan *stakeholder* yang sudah dilakukan BLK Kota Padang, saya rasa bisa mengantisipasi pengangguran agar tidak bertambah lagi. Jika memerlukan penambahan anggaran, tinggal diajukan sesuai prosedur yang semestinya,” kata politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Kemudian, untuk menuju pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, diharapkan pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat fokus bisa mengembangkan BLK-BLK yang ada. Mengingat fungsi BLK adalah untuk melaksanakan pelatihan pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja, melakukan pelatihan kerja dan pelayanan konsultasi pemberdayaan dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

■ rni/es/sf



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meninjau BLK Kota Padang, Sumatera Barat. Foto: Runi/Mr

Destinasi Alternatif Perlu Dukungan Semua Pihak

Keberadaan desa wisata yang menjadi destinasi penyangga dari destinasi prioritas harus didorong oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), para pengusaha dan entitas industri pariwisata. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para wisatawan terkadang tidak mampu bertahan lama di destinasi utama, mereka pasti jenuh, sehingga mencari alternatif hiburan lainnya.

Menurutnya, keberadaan desa wisata bisa menjadi wisata alternatif para wisatawan. “Sejak dari awal, saya membayangkan jika ada destinasi super prioritas semestinya harus ada destinasi alternatif *nah* desa wisata adalah destinasi alternatif yang menjadi penyangga dari destinasi prioritas tersebut,” kata Syaiful saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Batik Giriloyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (29/2).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, desa wisata perlu lebih diperhatikan dan harus bersinergi. “Terkait dengan sinergi, intinya harus ada kolaborasi

”

DESTINASI INI MELIBATKAN MASYARAKAT LANGSUNG DAN MERUPAKAN CITA-CITA YANG PALING BAIK, YAKNI WISATA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT SENDIRI, JADI PERLU DIDUKUNG DAN DIDORONG

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jangan saling menegasi. Saya dengar di sini tidak ada retribusi apapun, ini hebat dan perlu dicontoh. Ini merupakan komitmen yang luar biasa yang menjadi kesepahaman bersama. Jangan sampai kebijakan di kabupaten berbeda dengan yang ada di provinsi dan pusat,” jelas Syaiful.

Dalam peninjauan itu, Syaiful menemukan kendala yang ada di lapangan di antaranya aspek sarana dan prasarana yang masih dalam proses, daya tampung *homestay* yang masih kurang kemudian akses infrastruktur menuju destinasi yang harus diperbaiki serta area parkir yang tidak sekedar lapangan saja tetapi ke depannya harus dibuat yang lebih baik lagi.

“Menurut saya ini luar biasa karena destinasi ini melibatkan masyarakat langsung dan merupakan cita-cita yang paling baik, yakni wisata yang dikelola oleh masyarakat sendiri, jadi perlu didukung dan didorong. Hal ini merupakan model cara mendukung dan memfasilitasi,” pesan legislator dapil Jawa Barat VII itu. ■ cas/sf

Komisi X Pantau Kesiapan PPU Jadi Calon IKN



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dan Bupati PPU Abdul Gafur Masud. Foto: Dipa/Mr

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau kesiapan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN). Dede menekankan, sejumlah hal yang harus dipersiapkan di antaranya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal pertumbuhan dan perkembangan di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata yang nantinya akan menghadapi multikultur modern.

“Sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN), Komisi X DPR RI memantau sejauh mana kesiapan Provinsi

Kalimantan Timur, khususnya wilayah Panajam Paser Utara (PPU) yang nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara,” kata Dede saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Bupati PPU Abdul Gafur Masud bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU beserta mitra kerja terkait, di Kantor Bupati PPU, Kaltim, Sabtu (29/2).

Menurut Dede, wilayah PPU merupakan wilayah baru yang harus dipantau secara serius. Masih banyak persoalan yang harus diperbaiki ke depannya. “PPU merupakan kawasan baru. Baru 17 tahun pemekaran dan pembangunan belum terlalu

signifikan. Walaupun jalan-jalan sudah bagus, saya pikir dengan Bupati PPU yang sangat muda, sekaligus bisa membangkitkan gagasan besar untuk rencana pembangunan PPU ke depannya,” harap politisi Partai Demokrat itu.

Wilayah PPU harus dikembangkan, hal ini berkaitan dengan PPU yang nantinya akan menjadi IKN baru. “Setidaknya 80 persen wilayah calon IKN merupakan wilayah PPU. Menjadi sangat penting bagi negara untuk memperhatikan baik dari sisi SDM, infrastruktur, budaya dan pariwisata sebagai penunjang Ibu Kota Negara Nantinya. Dikarenakan hal ini belum terlihat maksimal. Jadi memang jangan cuma fokus pada IKN saja, PPU harus di-*upgrade*, karena ini akan menjadi zona IKN, baik itu zona pangannya, wisata, pendidikan, budaya dan lain sebagainya,” tutur Dede kepada **Parlementaria**.

Guna menuju PPU sebagai IKN baru, Dede berharap adanya kerja sama yang baik antara PPU dengan Pemerintah Pusat. Diperlukan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari supaya apa yang menjadi kekurangan PPU, bisa menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih baik. “Kami mengharapkan kepada Pemerintah, dan juga Bupati PPU yang sejauh ini sudah punya konsep, supaya dibuatkan *roadmap* atau *blue print*, lalu diberikan kepada Pemerintah Pusat agar dapat diselaraskan dengan (program) apa yang ada di pusat,” kata legislator dapil Jawa Barat II itu menutup wawancara. ■ dip/sf

Komisi X Dukung SMKN Penerbangan Aceh Jadi SMK Penerbangan Regional Sumatera

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI mendukung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Penerbangan Aceh menjadi SMK Penerbangan Regional di Sumatera. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menuturkan, dari hasil laporan yang diterima, SMKN Penerbangan Aceh merupakan salah satu sekolah yang patut menjadi contoh bagi sekolah kedirgantaraan di Indonesia, maka pihaknya akan memperjuangkan SMKN tersebut menjadi SMK Penerbangan Regional Sumatera.

“Dengan banyaknya lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan kuliah, maka ini menjadi bukti bahwa SMKN Penerbangan Aceh sangat layak menjadi contoh di Indonesia, bukan hanya di Pulau Sumatera,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat memimpin Tim Kunker meninjau sarana dan prasarana SMKN Penerbangan Aceh, Banda Aceh, Jumat (28/2). Turut hadir mitra kerja dan perwakilan Pemprov Aceh.

SMKN Penerbangan Aceh yang memiliki luas 26 hektar itu masih sangat minim fasilitas. Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dana Alokasi Aceh (DAK) sudah membangun satu hanggar pesawat di SMKN Penerbangan Aceh yang mampu menampung sebanyak tiga pesawat yang saat ini masih terparkir di Bandara Sultan Iskandar Muda.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari menuturkan, program pendidikan vokasi merupakan fokus utama



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI ke Aceh. Foto: Rryan/Mr

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politisi partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang baik, dibutuhkan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

“SMKN Penerbangan Aceh memiliki cita-cita menjadi SMK regional di Sumatera, sehingga anak-anak kita yang berada di Aceh atau Sumatera yang ingin melanjutkan sekolah di penerbangan tidak harus jauh-jauh ke Pulau Jawa,” tutur Desy sembari meyakini dengan pemerataan pendidikan yang didukung sarpras yang baik akan membuat masyarakat Indonesia

menjadi lebih baik dan berkembang dengan mutu pendidikan yang memadai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Rachmat Fitri menuturkan sejarah Aceh sangat erat kaitannya dengan kedirgantaraan, hal itu terbukti dengan pembelian pesawat pertama Dakota RI-001 Seulawah untuk negara Indonesia yang sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya Maskapai Garuda Indonesia. Pesawat tersebut merupakan hasil uang sumbangan rakyat Aceh. “Mudah-mudahan SMKN Penerbangan Aceh menjadi sekolah maskapai terbaik di Indonesia. Kami memohon doa dan dukungan dari Komisi X DPR RI agar harapan kami dapat terwujud di masa yang akan datang,” tuturnya. ■ rh/sf

Komisi XI Dorong Optimalisasi Target Penerimaan DIY

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menyampaikan, jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan *stakeholder* keuangan perlu kembali menyiapkan langkah-langkah strategi khusus perpajakan guna mencapai target penerimaan pajak negara, pengelolaan wajib pajak baru, serta mencari potensi-potensi terbaik Objek Pajak Baru. Hatari menekankan, optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang akan atau sudah dilakukan harus tetap terus menerus dioptimalkan dari tahun ke tahun.

“Apalagi kita ketahui perekonomian dunia masih belum kembali pulih, termasuk dampak tambahan ancaman virus Corona terhadap pariwisata DIY,”

jelas Hatari saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kepala Kanwil Kementerian Keuangan DIY, Kepala Perwakilan BPK DIY, Kepala Perwakilan BPKP DIY, dan Pemerintah Provinsi DIY, di Kantor Aula Kanwil Pajak, Sleman, DIY, Jumat (28/2). Kunker ini dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan upaya pencapaian target serta optimalisasi yang akan dan sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenkeu DIY.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, strategi khusus perpajakan itu haruslah dilakukan untuk memacu dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yang belum merata di antar kota DIY dengan 4 kabupaten lain yang ada di DIY. Ia

pun mempertanyakan sejauh mana perkembangan realisasi pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah di DIY yang belum merata dan masih didominasi pendapatan sektor pariwisata dan UMKM, sedangkan di beberapa daerah seperti di kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam diskusi, terungkap bahwa target pajak tahun 2020 yang diamanahkan kepada Kanwil DJP DIY naik 23,59 persen dari realisasi tahun 2019. Hatari menilai, butuh upaya kerja keras untuk memacu target tersebut. Apalagi, tambah Hatari, penerimaan pajak di DIY masih berasal dari 5 sektor, yaitu perdagangan, jasa keuangan, administrasi pemerintah, konstruksi dan industri pengolahan. ■ *gd/sf*



Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI dengan Kakanwil Kementerian Keuangan DIY dan mitra kerja terkait. Foto: Guntur/Mr

Genjot Optimisme Perekonomian, Skenario Antisipasi Harus Disiapkan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyarankan Pemerintah untuk menyiapkan skenario antisipasi guna menyikapi fenomena perlambatan sektor ekonomi seperti angka kredit, dana pihak ketiga dan penurunan konsumsi rumah tangga sebagai dampak epidemi global yang disebabkan wabah virus Corona (COVID-19).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa skenario tersebut harus disiapkan secara matang untuk menciptakan iklim optimis pada pertumbuhan perekonomian masa depan dan mencegah penurunan perekonomian nasional.

“Adanya epidemi virus Corona ini, (skenario) harus disiapkan secara matang. Karena kalau *enggak*, saya kira kita akan mengalami situasi pertumbuhan ekonomi yang menurun sekali,” ungkapnya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2).

Fathan memberi terobosan bahwa Pemerintah perlu menggenjot sektor domestik sebagai upaya mendongkrak ekonomi nasional. “Nah Komisi XI menekankan agar Pemerintah menggenjot sektor domestik, karena kalau ekspor impor kita mengalami perlambatan semua,” tandas Fathan.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong kepada sektor perbankan agar menerapkan Kredit Usaha Rakyat

”

KITA MENDORONG SEKTOR PERBANKAN UNTUK AGRESIF, UNTUK KEMUDIAN JEMPUT BOLA, UNTUK KEMUDIAN MEMPERHATIKAN LAGI SEKTOR-SEKTOR UMKM YANG MASIH BISA DIMAKSIMALKAN

(KUR) menjadi lebih aplikatif dan fokus terhadap realisasi di sektor ritel, serta memaksimalkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) potensial agar dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional.

“Kita mendorong sektor perbankan untuk agresif, untuk kemudian jemput bola, untuk kemudian memperhatikan lagi sektor-sektor UMKM yang masih bisa dimaksimalkan. Mungkin yang masih bisa digenjot lagi

pertumbuhannya supaya menjadi kekuatan ekonomi nasional,” yakin legislator dapil Jawa Tengah II itu.

■ srw/sf

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan. Foto: Fitri/Mr





Tim Kunker Komisi VIII DPR RI menyalurkan bansos PKH secara simbolis kepada perwakilan KPM di Padang, Sumbar. Foto: Sofyan/Mr

Penerima PKH Didorong Jadi Masyarakat Mandiri

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial sepakat, fokus penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah ke depannya diharapkan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Sementara tujuan akhirnya adalah KPM dalam kriteria penerima PKH dapat diberdayakan, dan segera graduasi dari PKH dan menjadi masyarakat mandiri.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menghadiri penyaluran bansos PKH Tahap I Tahun 2020 kepada KPM se-Kota Padang, di Asrama Haji Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (29/2/2020). Dalam kesempatan itu,

hadir perwakilan Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Padang, Pendamping PKH, perwakilan Bank BRI, serta ratusan KPM penerima PKH.

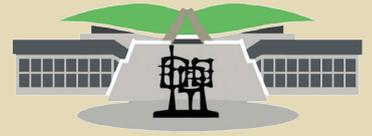
“Dengan bertambahnya bantuan sosial untuk para KPM ke depannya mereka sejahtera, kemudian diberdayakan dan menjadi mandiri. Jadi nanti data masyarakat yang kurang mampu sebesar 98,6 persen bisa berkurang drastis. Itu tujuan kita untuk mencapai sila kelima Pancasila, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,’” kata politisi PDI-Perjuangan itu sembari menambahkan ada sejumlah peningkatan besaran bansos yang diterima KPM.

Sementara terkait penyaluran PKH di Padang, ia menilai sudah cukup baik. Namun ia mendorong agar KPM yang sudah mampu, agar “keluar” dari data masyarakat penerima PKH. Pасalnya,

menurut Ihsan, masih banyak masyarakat lain yang lebih membutuhkan PKH.

“(Agar mereka segera mandiri) Para KPM itu (rumahnya) diberi stiker, tulisannya kami adalah penerima bantuan sosial,” kata politisi dapil Jambi itu sembari mengapresiasi langkah pemberian stiker oleh Pemkot Padang di setiap rumah tinggal penerima PKH itu.

Sementara itu dalam sambutannya di hadapan Komisi VIII DPR RI, Direktur Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Rachmat Koesnadi mengatakan, bansos PKH Tahap I Tahun 2020 di Sumbar telah disalurkan sebesar Rp 158,602 miliar dengan 173.039 KPM. Acara ini diakhiri dengan penyaluran PKH secara simbolis kepada perwakilan masyarakat KPM, dan beasiswa pendidikan kepada anak penerima PKH yang berprestasi. ■ sf



Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi para Pimpinan DPR RI memandu pelantikan Anggota PAW DPR RI dari F-PDI Perjuangan dan F-NasDem pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Foto: Kresno, Arief/Man



Ketua DPR RI Puan Maharani memukul gong tanda dimulainya Seminar Nasional MKD DPR RI bertema "Arah Baru Kebijakan MKD, Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah" di Jakarta, Senin (24/2/2020) . Foto: Jaka/Man



Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen dan BK DPR RI mengikuti Pameran Kampung Hukum 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020). Stan DPR RI dikunjungi Anggota DPR RI Arteria Dahlan (foto kanan) dan Ketua MA Hatta Ali (foto kiri). Foto: Arief/Man

